

KOLABORASI MENUJU TRANSISI ENERGI BERKELANJUTAN



DAFTAR ISI

LATAR BELAKANG & TUJUAN	6
Mengejar Elektrifikasi, Menopang Pertumbuhan Ekonomi	8
Memenuhi Kebutuhan Agenda Strategis	10
Menuju Transisi ke Energi Berkelanjutan	12
TANTANGAN & KENDALA	14
Kualitas Jaringan dan Distribusi Belum Ideal	16
Kelebihan di Barat, Kekurangan di Timur	18
Pendanaan Internal PLN Terbatas	20
Terhambat Regulasi & Skema Tarif EBT	22
USULAN REKOMENDASI	24
Mendorong Kolaborasi PLN-Swasta	26
Memperbaiki Iklim Investasi	28
Memacu Pembangunan Pembangkit EBT	30

PENGANTAR

Dampak pandemi Covid-19 telah membangkitkan kesadaran bersama di tingkat global mengenai pentingnya pembangunan berkelanjutan jangka panjang. Pemerintah di seluruh dunia mengeluarkan paket stimulus untuk memperkuat kesehatan masyarakat, serta membangun ekonomi dan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan di masa depan.

Berbagai lembaga di dunia, baik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dana Moneter Internasional (IMF), World Economic Forum (WEF), The International Renewable Energy Agency (IRENA) menekankan pentingnya ekonomi berkelanjutan dalam pemulihan ekonomi

pasca pandemi. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) di sektor kelistrikan adalah salah satu program yang ditekankan dalam pemulihan ekonomi berkelanjutan.

Ada sejumlah alasan dibalik keinginan masyarakat global mempercepat penerapan EBT. Pertama, infrastruktur EBT akan menjadi solusi pengembangan energi berkelanjutan sejalan dengan upaya memperkuat ekonomi di masa depan. Hal ini akan mendorong percepatan transisi dengan pengurangan infrastruktur pembangkit berbahan bakar fosil generasi pertama yang sudah usang dan terlantar. Kedua, EBT berpotensi memberikan *return* 3-8 kali lebih tinggi dari investasi awal. Menurut Kajian IRENA, dengan

skenario ambisius-realistis, transformasi energi dunia akan menelan investasi US\$ 19 triliun, namun akan memberikan manfaat senilai US\$ 50-142 triliun hingga 2050.

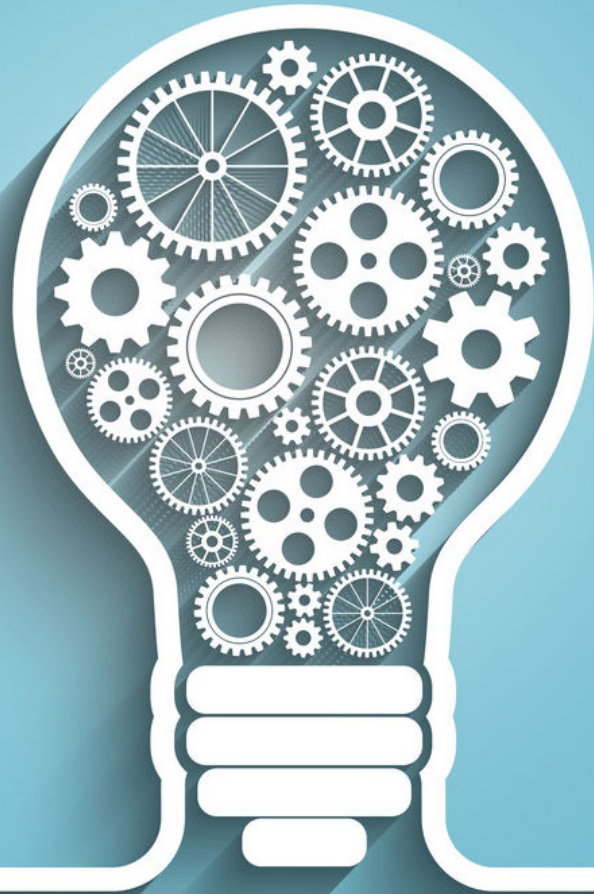
Ketiga, investasi EBT akan mencegah kenaikan suhu global dan mengurangi risiko dampak perubahan iklim berupa banjir di wilayah perkotaan. Keempat, investasi EBT juga untuk menghindari risiko dari fluktuasi harga bahan bakar fosil. Saat ini terbukti, industri migas dan batubara sangat terpukul oleh virus korona akibat anjloknya permintaan dan penurunan harga minyak mentah *seaborne thermal coal* secara global.

Indonesia, sudah memiliki *road map* bauran energi dengan target pemanfaatan EBT 23% pada 2025. Saat ini, pemanfaatan EBT baru mencapai 14% dari total penggunaan energi Indonesia. Untuk mengejar target bauran energi tersebut, ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah perbaikan iklim investasi kelistrikan, mendorong kolaborasi PLN-Swasta, serta percepatan pembangunan pembangkit yang menggunakan EBT.

Jakarta, Juli 2020

LATAR BELAKANG & TUJUAN

Mengacu pada tujuan pembangunan nasional, pengembangan sektor kelistrikan bukan hanya ditujukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, namun juga pemenuhan target bauran energi pembangkitan dengan percepatan peningkatan porsi energi baru dan terbarukan (EBT).



MENGEJAR ELEKTRIFIKASI, MENOPANG PERTUMBUHAN EKONOMI

Tenaga listrik merupakan infrastruktur strategis yang berguna untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yakni menciptakan masyarakat adil dan makmur, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) ditegaskan bahwa penyediaan tenaga listrik akan lebih merata, andal dan berkelanjutan.

Guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut, dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) telah ditetapkan sasaran pencapaian rasio elektrifikasi sebesar 100% pada 2020. Artinya, seluruh rakyat Indonesia secara merata bisa mengakses listrik sehingga anak-anak bisa belajar dan masyarakat bisa menjalankan kegiatan ekonomi produktif sehingga kesejahteraan mereka meningkat.

Selain untuk pemerataan, sesuai UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan, PLN juga dituntut untuk memprediksi kebutuhan dan penyediaan tenaga listrik untuk kurun waktu dua puluh tahun ke depan. Tujuannya, agar penyediaan tenaga listrik bisa menopang pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk Indonesia ke depan.

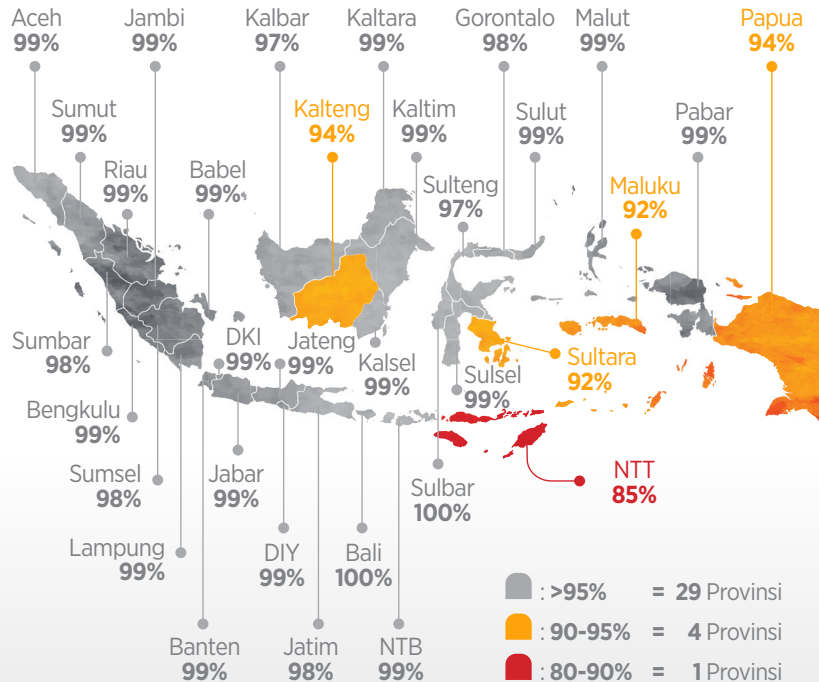
TARGET 2020: ELEKTRIFIKASI MENCAPAI 100%

Realisasi
2019

98,89%

100%

Target
2020



RUKN = Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional
 RUPTL = Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
 SUMBER: RUPTL, RUKN, KEMENTERIAN ESDM

TANTANGAN



Elektrifikasi **99%** secara kuantitas, namun belum secara kualitas.

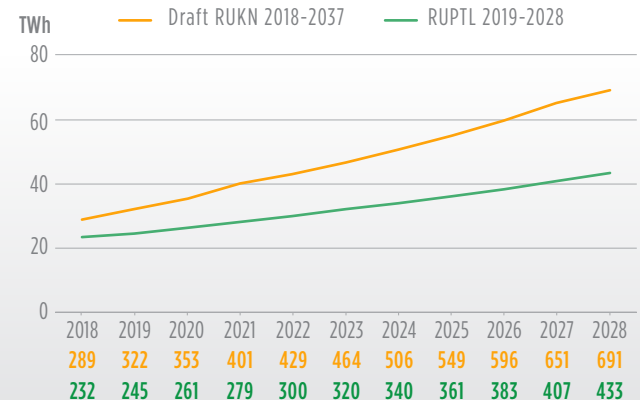


Hingga Desember 2019, **490** desa belum menikmati listrik selama 24 jam penuh

KEBUTUHAN TERUS MENINGKAT

Selain untuk elektrifikasi, kebutuhan listrik terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi nasional dan populasi Indonesia.

Proyeksi Kebutuhan Tenaga Listrik Nasional 2019-2028



MEMENUHI KEBUTUHAN AGENDA STRATEGIS

Selain untuk menopang pertumbuhan ekonomi, penambahan jumlah penduduk dan mengejar rasio elektrifikasi, penyediaan tenaga listrik dalam 10 tahun ke depan juga ditujukan untuk mengakomodasi semua potensi *demand* dalam jumlah besar. Potensi itu datang dari Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, Kawasan Pariwisata Strategis dan lainnya.

Sejumlah kawasan tersebut diperkirakan akan memacu permintaan tenaga listrik dalam jumlah besar di masa yang akan datang, hingga mencapai 2,5 GW. Selain itu masih ada proyek untuk jangka yang lebih panjang yang akan mendongkrak permintaan tenaga listrik, seperti ekosistem kendaraan listrik dan rencana pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur.

Karena itu, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019 – 2028, diperkirakan rata-rata pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik nasional sebesar 6,5%. Untuk memenuhi permintaan tersebut, dibutuhkan pembangunan kapasitas pembangkit sekitar 56,4 GW hingga 2028.



UNTUK KAWASAN INDUSTRI DAN DESTINASI WISATA PRIORITAS MEMERLUKAN SETIDAKNYA

2,5 GW



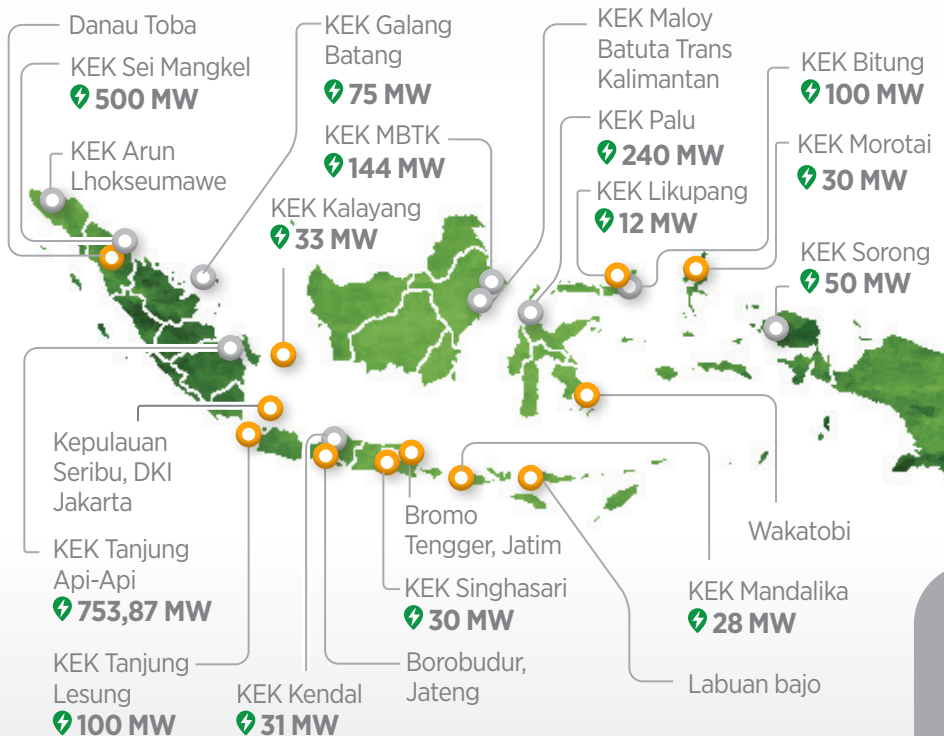
Kebutuhan Listrik



Destinasi Wisata



Kawasan Industri



KEK= Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata

PHEV = Plug-in Hybrid Electric Car

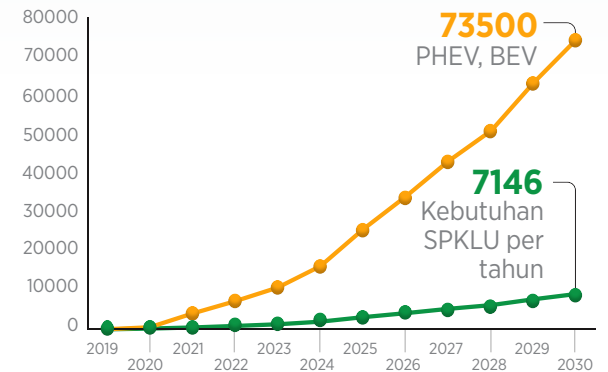
BEV = Battery Electric Vehicle, SPKLU = Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum

SUMBER: DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS, PLN, KEMENPAR.



PROYEKSI KEBUTUHAN EKOSISTEM KENDARAAN LISTRIK

2,3 GW
PADA 2023



Kec. Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara

Kec. Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara



PERKIRAAN KEBUTUHAN IBU KOTA NEGARA BARU

1,55 GW



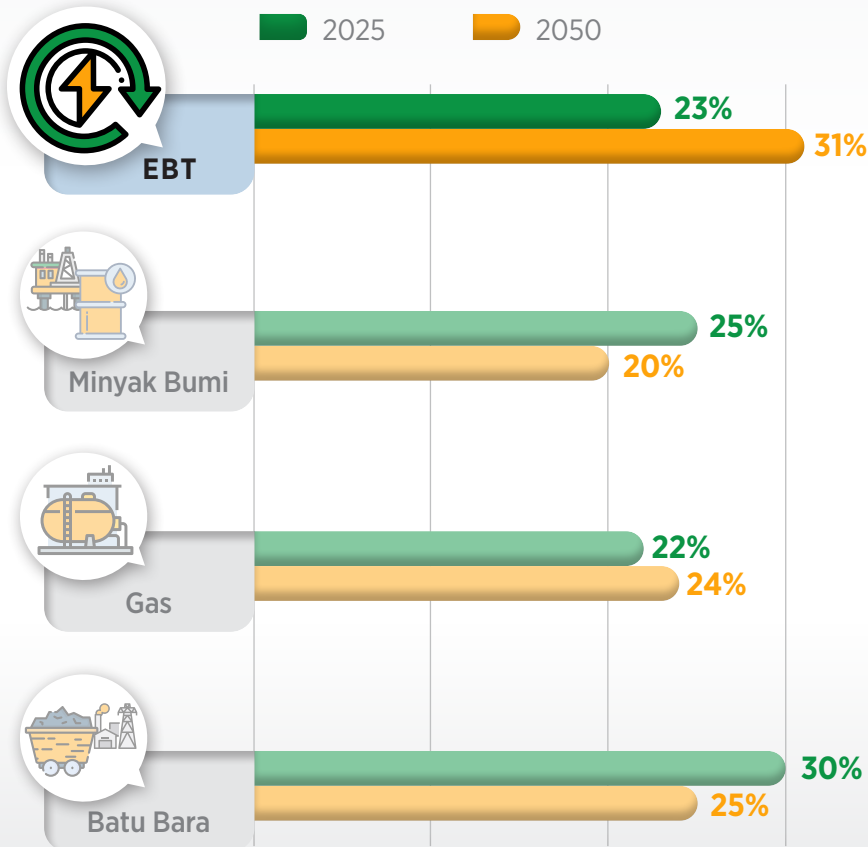
MENUJU TRANSISI KE ENERGI BERKELANJUTAN

Berkurangnya produksi energi fosil, serta komitmen global dalam pengurangan emisi gas rumah kaca, mendorong pemerintah meningkatkan peran energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan dan kemandirian energi.

Sesuai Kebijakan Energi Nasional, target bauran EBT pada 2025 paling sedikit 23% dan 31% pada 2050. Untuk mengejar target tersebut, Indonesia bisa memanfaatkan potensi sumber energi terbarukan seperti sinar matahari, angin, tenaga air, biomassa, biogas, sampah kota, dan panas bumi. Sumber energi tersebut bisa dimanfaatkan secara optimal untuk pembangkitan tenaga listrik.

Potensi panas bumi membentang sepanjang Bukit Barisan di Pulau Sumatra. Sumber energi panas bumi pun tersimpan juga di Pulau Jawa, Bali, Lombok, Flores, Sulawesi hingga Maluku. Sementara potensi tenaga air tersebar dari Aceh sampai Lampung, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua.

TARGET BAURAN ENERGI PEMBANGKIT LISTRIK 2025 DAN 2050



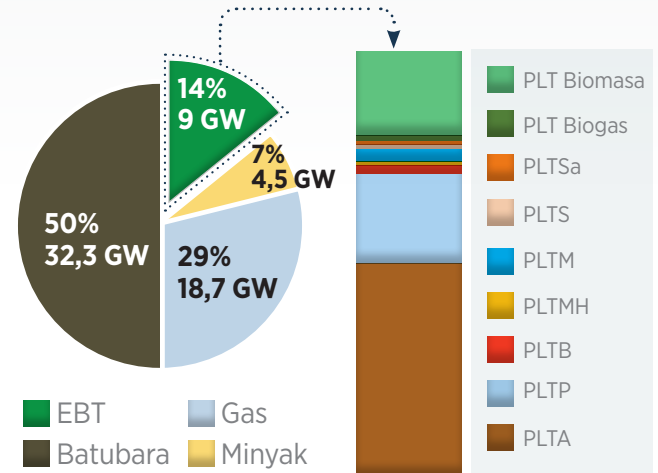
EBT= Energi Baru Terbarukan
PLTA = Pembangkit Listrik Tenaga Air
PLTP = Tenaga Panas bumi

PLTB = Tenaga Bayu (angin)
PLTMH = Tenaga Mikrohidro
PLTM = Tenaga Minihidro

PLTS = Tenaga Surya
PLTSa= Tenaga Sampah

SUMBER: RUPTL 2019-2028, OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2019

KAPASITAS TERPASANG EBT BARU 14% DI 2018

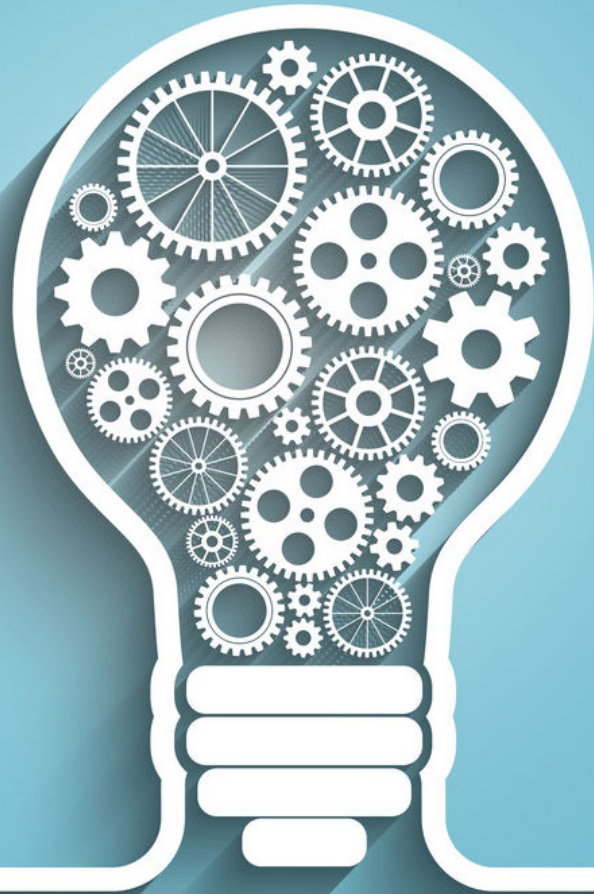


POTENSI ENERGI TERBARUKAN DI INDONESIA

Jenis Energi	Potensi
Tenaga Air	94,3 GW
Panas Bumi	28,5 GW
Bio Energi	PLT Bio: 32,6 GW dan BBN: 200 Ribu Bph
Surya	207, 8 GWp
Angin	60,6 GW
Energi Laut	17,9 GW

TANTANGAN & KENDALA

Tantangan dan kendala yang dihadapi sektor Ketenagalistrikan untuk memenuhi target bauran energi dan rasio elektrifikasi tidaklah mudah. Fakta menunjukkan konsumsi masih rendah, jaringan belum ideal serta terjadi kekurangan pasokan di Indonesia Timur. Namun, sektor kelistrikan dihadapkan pada keterbatasan pendanaan PLN, serta hambatan regulasi dan persoalan tarif.



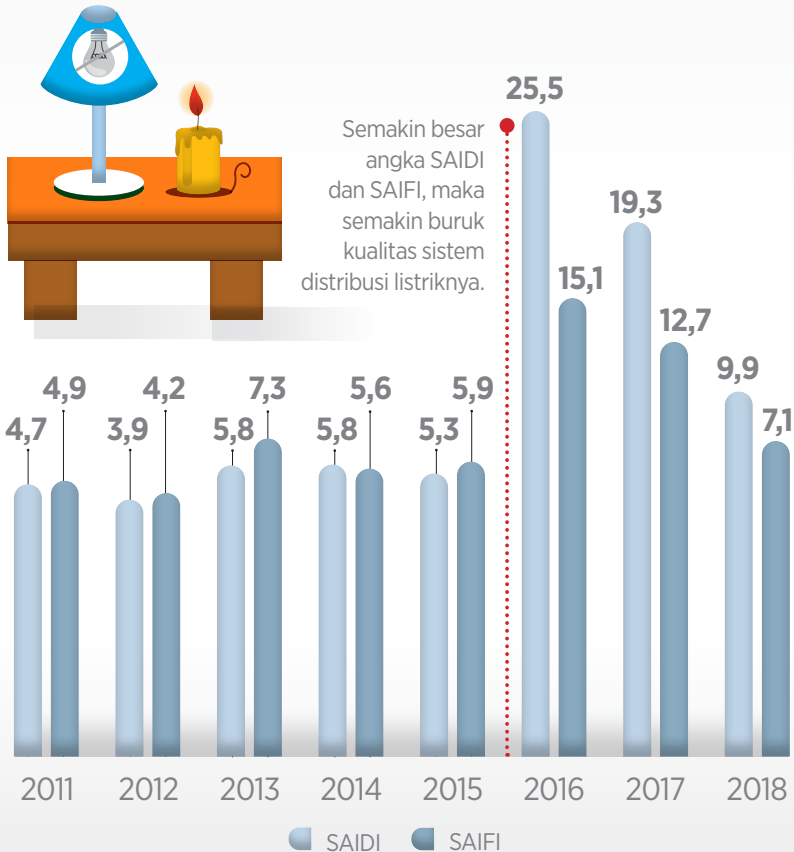
KUALITAS JARINGAN DAN DISTRIBUSI BELUM IDEAL

Meski terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, konsumsi listrik di Indonesia belum memenuhi target. Pada 2019, PLN menargetkan konsumsi per kapita sebesar 1.200 kWh, namun baru terealisasi 1.084 kWh. Karena itu, pada 2020, PLN menurunkan target menjadi 1.142 kWh.

Sedangkan, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, konsumsi listrik Indonesia justru masih sangat jauh di bawah mereka. Indonesia berada di peringkat 6 untuk konsumsi listrik per kapita, jauh di bawah Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Thailand, dan bahkan Vietnam.

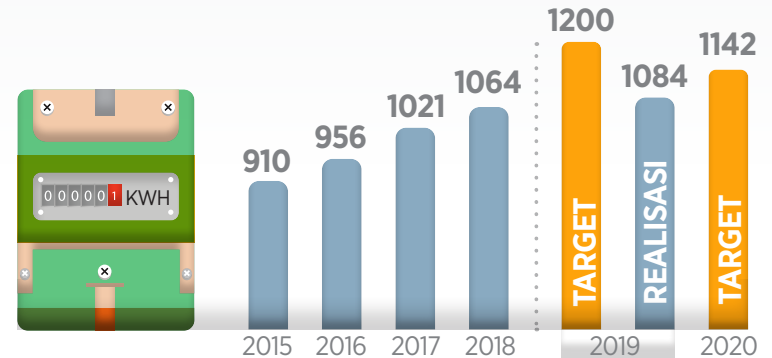
Selain konsumsi, tingkat keandalan kualitas jaringan distribusi listrik juga belum ideal. Kualitas jaringan terlihat dari rerata lama pemadaman listrik per pelanggan (SAIDI) dan rerata gangguan listrik per pelanggan (SAIFI). Kualitas jaringan listrik dinilai andal jika $SAIFI \leq 2,41$ jam/pelanggan/tahun dan $SAIDI \leq 12,84$ jam/pelanggan/tahun. Pada 2018, SAIDI sudah mencatatkan angka 9,88. Namun SAIFI sebesar 7,12 menunjukkan gangguan listrik masih sering terjadi.

KUALITAS JARINGAN BELUM MERATA

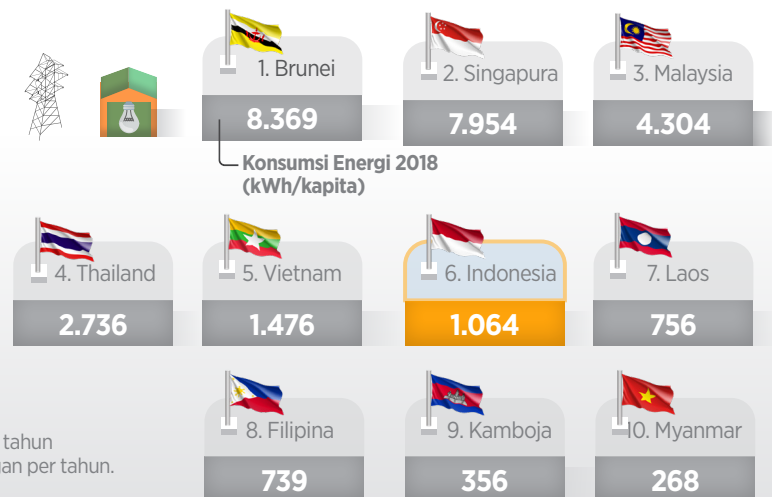


kWh= kilo watt hour
SAIDI=System Average Interruption Duration Index, rata-rata lama (jam) padam per pelanggan per tahun
SAIFI=System Average Interruption Frequency Index, rata-rata (jam) jumlah gangguan per pelanggan per tahun.
SUMBER: RUPTL PLN 2019-2038, LAPORAN TAHUNAN PLN 2018, WORLD BANK, INDEKS MUNDI

KONSUMSI NASIONAL BELUM MENCAPAI TARGET (KWH/KAPITA)



KONSUMSI LISTRIK INDONESIA TERTINGGAL DI ASEAN



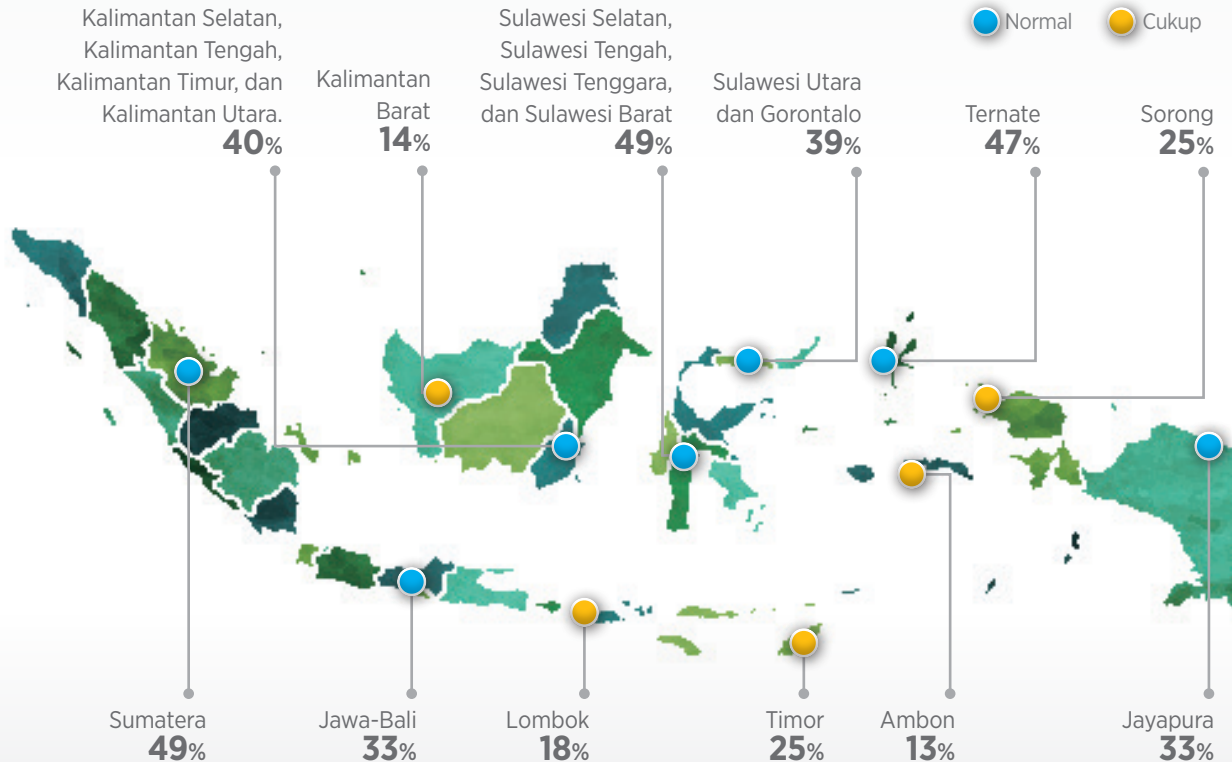
KELEBIHAN DI BARAT, KEKURANGAN DI TIMUR

Pasokan listrik nasional masih berpusat di wilayah barat Indonesia, secara khusus Jawa-Bali. Studi yang dilakukan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) tahun 2019, menunjukkan bahwa RUPTL, secara khusus di regional Jawa-Bali dan Sumatera, terdapat kelebihan proyeksi permintaan berkisar 20-50 persen lebih tinggi dibandingkan tren pertumbuhan listrik dalam satu dekade terakhir.

Berkaca dari angka cadangan listrik (*reserve margin*) secara nasional sebesar 36 persen, sebenarnya sudah memenuhi kriteria aman. Berdasarkan data yang diolah dari RUPTL 2019-2028, dalam kondisi normal, angka reserve margin nasional diproyeksikan pada level 32 persen.

Untuk sistem Jawa-Bali, standar *reserve margin* di kisaran 30-35 persen. Sedangkan, untuk wilayah Sumatra dan Indonesia Timur, angka reserve margin ditetapkan 35-40 persen. Kenyataannya, di sejumlah wilayah, seperti di Lombok, Ambon, dan Sorong, tingkat *reserve margin* masih ada yang di bawah 30 persen. Ini menunjukkan bahwa pada sebagian wilayah Indonesia Timur masih mengalami keterbatasan pasokan listrik.

KONDISI SISTEM DAYA KELISTRIKAN PADA TAHUN 2019



Cadangan Daya Listrik (Reserve Margin) | Nasional: 36 persen (Aman)

KELEBIHAN LISTRIK DI SISTEM JAWA-BALI

- Prediksi RUPTL 2018-2027 pertumbuhan listrik Jawa-Bali, **6 persen meleset**.
- Potensi kelebihan kapasitas sampai **13,3 GW dalam 10 tahun mendatang**.

KETERBATASAN LISTRIK DI WILAYAH TIMUR INDONESIA

- Cadangan daya listrik di Lombok, Kalimantan Barat, Ambon, dan Sorong masih **di bawah 30 persen**.
- Per Desember 2019, terdapat **490 desa belum dialiri listrik, 90 persen di Papua dan Papua Barat**.
- Pemadaman listrik masih **kerap terjadi di Papua**.

PENDANAAN INTERNAL PLN TERBATAS

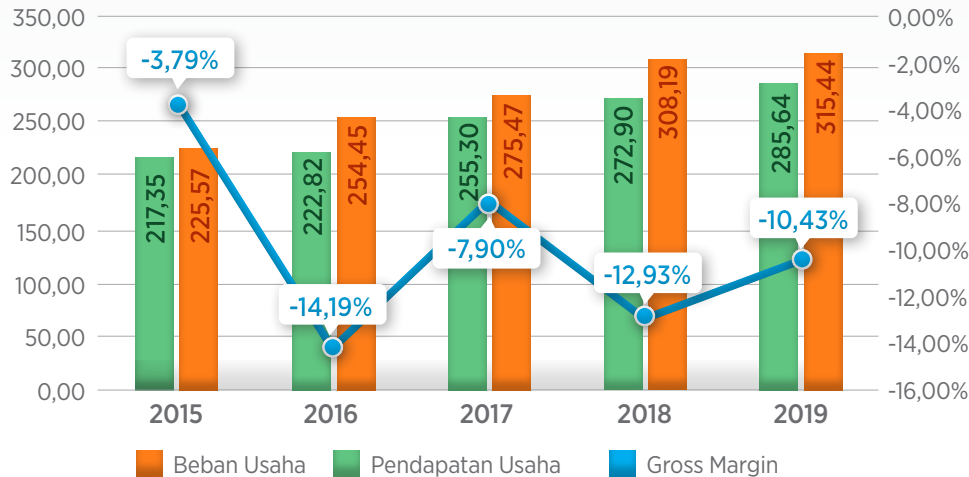
Dalam beberapa tahun terakhir, kondisi keuangan PLN terus menunjukkan tren yang kurang menggembirakan. Pendapatan selalu lebih rendah dari beban usaha akibat kenaikan biaya pokok produksi (BPP), sedangkan tarif listrik belum naik sejak Mei 2017. Apalagi, PLN menanggung beban pinjaman yang tidak kecil.

Dalam dua tahun terakhir, pendapatan pelanggan menutupi sekitar 79-84% dari biaya pokok produksi PLN. Untuk mengatasi selisih biaya produksi dan pendapatan tersebut, pemerintah memberikan subsidi listrik dari APBN. Pemerintah juga memberikan *margin* yang ideal bagi PLN sekitar 5-8% agar keuangannya tetap sehat dan tetap bisa berinvestasi.

Dengan beban keuangan yang cukup berat, pendanaan PLN untuk membiayai program pembangunan infrastruktur menjadi semakin terbatas. Untuk meringankan beban keuangan PLN, pemerintah turut membantu dengan memberikan suntikan modal dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) sehingga bisa mengurangi porsi pinjaman dan membiayai pengembangan infrastruktur kelistrikan.

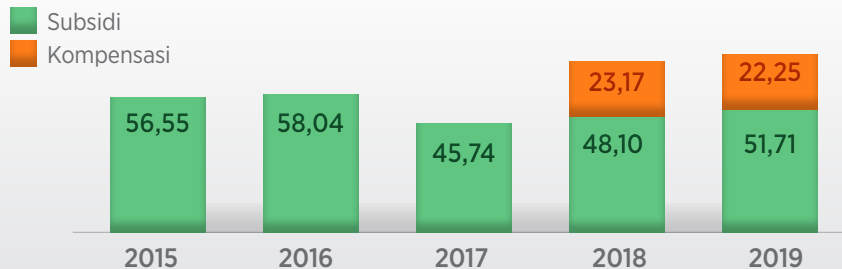
GROSS MARGIN SEMAKIN DALAM

Dalam Triliun Rupiah



SUNTIKAN SUBSIDI DAN KOMPENSASI JADI PENYELAMAT

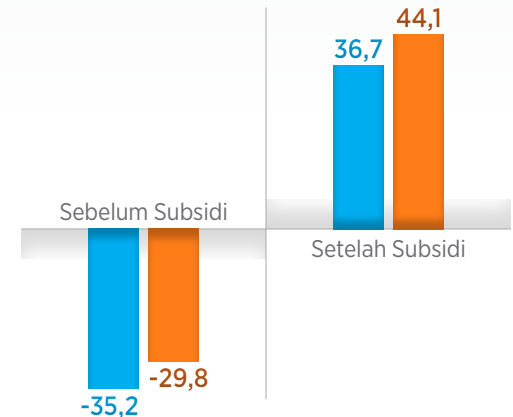
Subsidi dan Kompensasi untuk PLN (Triliun Rupiah)



NERACA LABA/RUGI PLN

(TRILIUN RUPIAH)

■ 2018 ■ 2019



PENYEBAB BEBAN BERAT KEUANGAN PLN

- Tarif listrik belum berubah sejak 2017
- Pendapatan tergerus beban usaha
- Beban bahan bakar yang terus naik
- Selisih Kurs (*unrealised loss*)

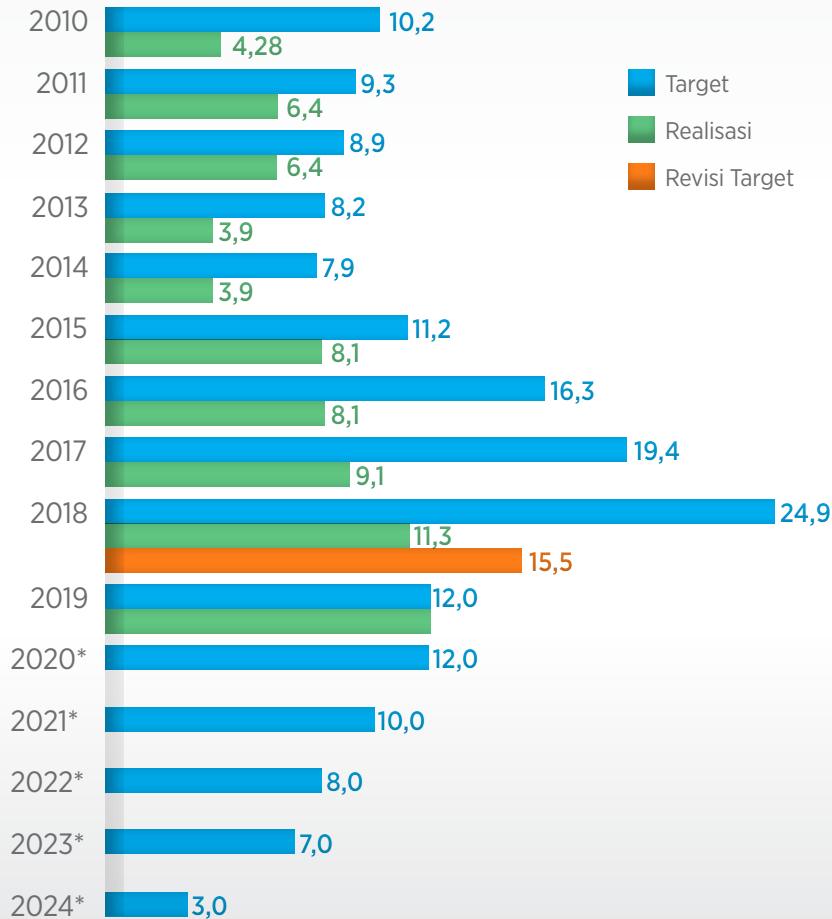
TERHAMBAT REGULASI & SKEMA TARIF EBT

Sejatinja, potensi investasi pemenuhan kebutuhan listrik di Indonesia terbuka lebar. Namun, dalam 10 tahun terakhir realisasi investasi tidak pernah mencapai target. Padahal, hingga 2028, Indonesia diperkirakan membutuhkan tambahan kapasitas hingga 56,4 GW.

Tidak bisa dimungkiri, masih ada sejumlah persoalan yang dihadapi oleh investor dalam membangun infrastruktur kelistrikan. Pertama, dari sisi ketidakpastian regulasi seperti keruwetan regulasi lintas sektoral, tumpang tindih kewenangan pusat – daerah, hambatan dari perda, serta persoalan perizinan yang terhambat karena daerah belum memiliki Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

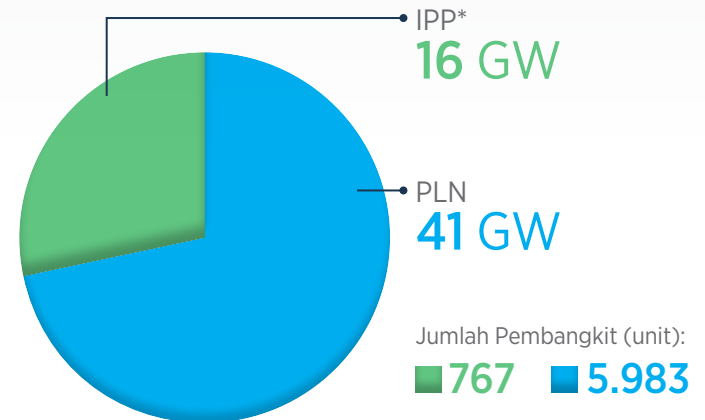
Kedua, masalah skema kepemilikan pembangkit yang tidak menarik bagi investor sehingga sulit mendapatkan pendanaan karena dianggap tidak *bankable*. Ketiga, persoalan skema tarif listrik EBT yang tidak ideal bagi investor.

INVESTASI LISTRIK BARU MENCAPAI TARGET PADA 2019 (MILIAR US\$)



SUMBER: KEMENTERIAN ESDM, KATADATA INSIGHT CENTER

PEMBANGKIT IPP MENYUMBANG HAMPIR 1/3 DARI KAPASITAS PEMBANGKIT NASIONAL



*) Keterangan:

IPP: *Independent Power Producer* (Produsen Pembangkit Swasta)

PANGKAL MASALAH INVESTASI KELISTRIKAN

1

Ketidakpastian
regulasi pusat &
daerah

3

Skema
kepemilikan
pembangkit
tidak menarik

2

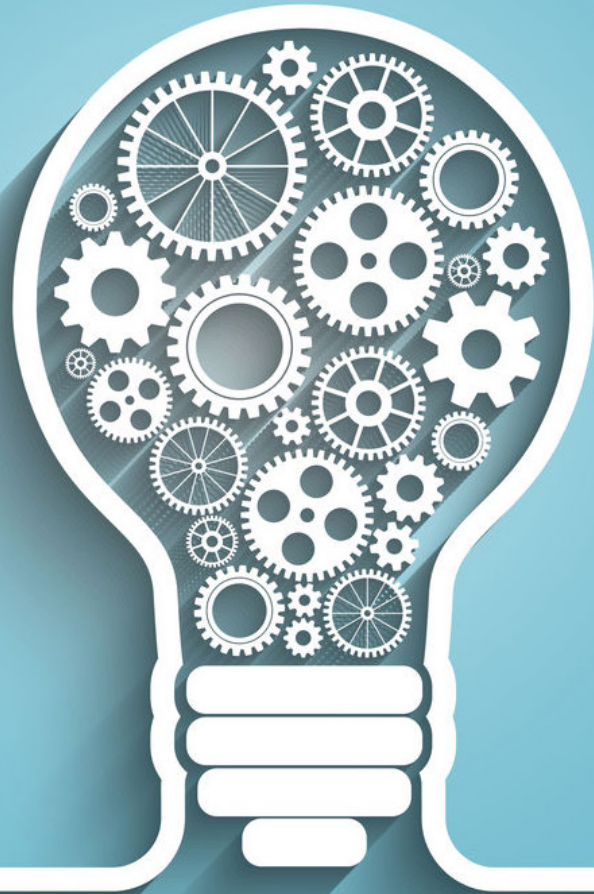
Perizinan
terhambat
masalah RTRW

4

Skema tarif listrik
EBT tidak ideal
bagi investor

USULAN REKOMENDASI

Untuk menghadapi tantangan dan kendala terkait pemenuhan target di sektor kelistrikan, ada sejumlah langkah yang mendesak dilakukan. Di antaranya adalah mendorong kolaborasi PLN-swasta, memperbaiki iklim investasi kelistrikan serta mempercepat pembangunan pembangkit EBT.



MENDORONG KOLABORASI PLN-SWASTA

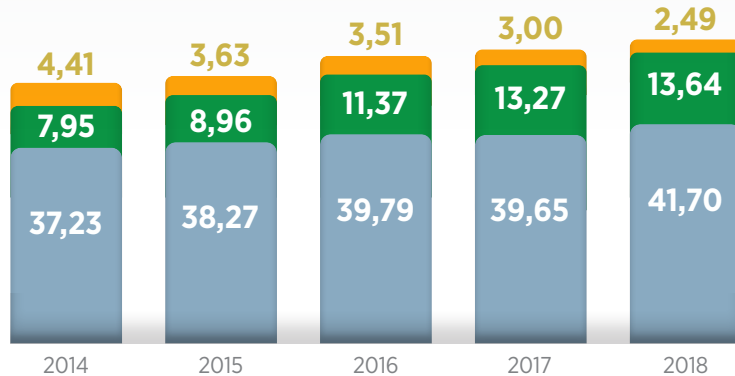
Untuk memenuhi target bauran energi, menopang pertumbuhan ekonomi dan program pemerintah, serta mengejar target elektrifikasi, dalam RUPTL PLN 2019 – 2028, diperkirakan akan membutuhkan tambahan kapasitas pembangkit listrik hingga 56,4 GW hingga 10 tahun ke depan. Dengan perkiraan tersebut, potensi investasi sektor kelistrikan di Indonesia terbuka lebar.

Mengingat kebutuhan investasi kelistrikan sangat besar, tentu akan berat jika PLN harus membangun pembangkit sendiri. Peran swasta atau *independent power producer* (IPP) menjadi semakin penting dalam 10 tahun ke depan. Kolaborasi dengan swasta semakin dibutuhkan untuk pembangunan pembangkit energi terbarukan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

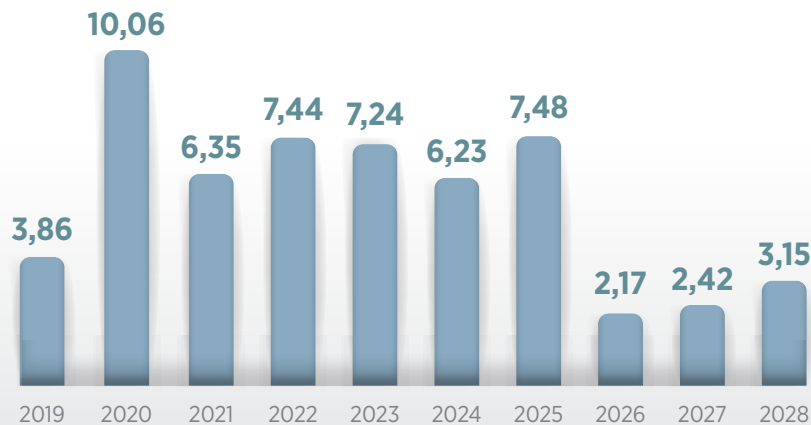
Dengan dukungan swasta di pembangkit, PLN bisa mempunyai kelonggaran dalam membangun jaringan transmisi dan distribusi pada 2019 – 2028. Untuk jangka waktu 10 tahun ke depan, diperkirakan kebutuhan jaringan transmisi sepanjang 57 ribu kilometer sirkuit (kms) dan jaringan distribusi sepanjang 472 ribu kms.

KONTRIBUSI PEMBANGKIT SWASTA MASIH PERLU DITINGKATKAN

- **Kapasitas Terpasang (GW)** ■ Milik PLN ■ Swasta (IPP) ■ Sewa



- **Kebutuhan Tambahan Pembangkit (GW)**



SOURCE: PLN, RUPTL 2019-2028

PEMBANGUNAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI

Target Penambahan Sistem Operasional PLN 2019-2028



Jaringan Transmisi sepanjang

57.293 kms

Terdiri dari:

Transmisi (kV)	Total (kms)
500	10.135
275	4.159
150	41.382
70	1.617



Kapasitas gardu induk sebesar

124.341 MVA



Jaringan distribusi sepanjang

472.795 kms



Kapasitas gardu distribusi sebesar

33.730 MVA

MEMPERBAIKI IKLIM INVESTASI

Pemerintah memang terus berupaya untuk memperbaiki iklim investasi guna menarik investor di sektor kelistrikan, termasuk bersedia menanamkan modal di pembangkit EBT. Perbaikan iklim investasi juga dilakukan melalui pemberian insentif fiskal bagi investor, baik dalam bentuk insentif perpajakan dan pembebasan bea masuk maupun dukungan jaminan pemerintah dalam rangka kerja sama pemerintah – swasta.

Selain itu, perbaikan regulasi yang mencakup perbaikan model bisnis, perbaikan pola kerja sama dan komposisi saham pembangkit untuk mendorong pinjaman yang *bankable*. Pemerintah juga perlu memperbaiki kewenangan pusat – daerah, serta penyederhanaan regulasi lintas sektoral.

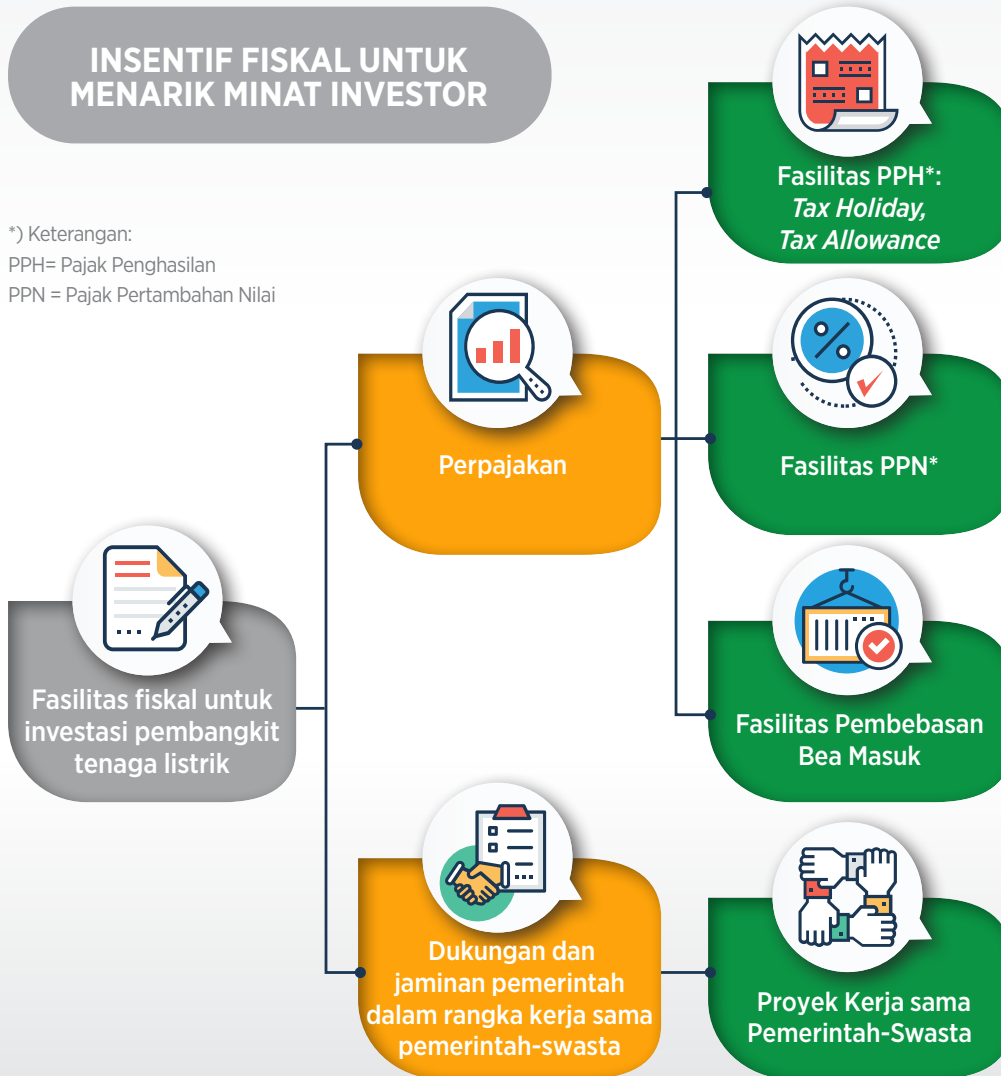
Khusus untuk pembangkit EBT, pemerintah sedang menyusun Peraturan Presiden baru untuk EBT dengan skema Feed in Tarriff. Selama ini, skema tarif EBT dianggap kurang ideal oleh para pengembangan sehingga mereka kurang tertarik berinvestasi di pembangkit EBT.

INSENTIF FISKAL UNTUK MENARIK MINAT INVESTOR

*) Keterangan:

PPH= Pajak Penghasilan

PPN = Pajak Pertambahan Nilai



PERBAIKAN REGULASI



Perbaiki skema kepemilikan pembangkit agar proyek *bankable*



Perbaiki iklim investasi melalui Omnibus Law untuk:

- Perbaiki kewenangan tumpang tindih pusat - daerah.
- Penyederhanaan regulasi lintas sektoral.

PENYESUAIAN TARIF LISTRIK



Tarif listrik yang sesuai dengan nilai keekonomian sehingga bisa menyehatkan keuangan PLN

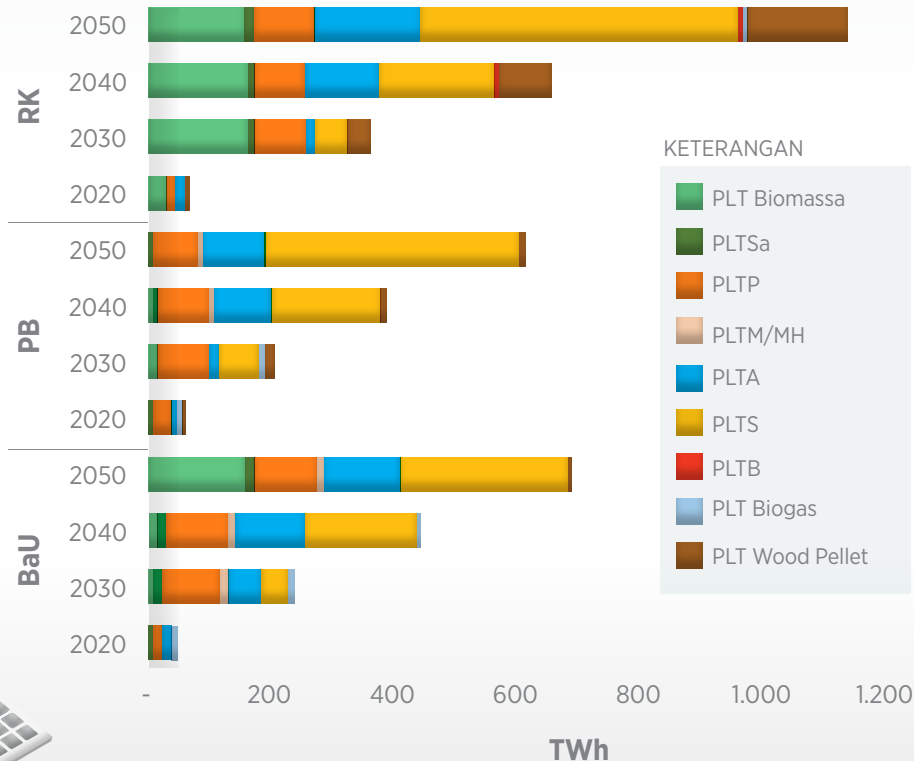
MEMACU PEMBANGUNAN PEMBANGKIT EBT

Indonesia merupakan negara dengan total potensi energi terbarukan sangat besar (ekuivalen dengan 442 GW). Sayangnya, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan pembangkit listrik. Ini dipengaruhi oleh tingginya harga produksi, kurangnya dukungan industri dan sulitnya pendanaan.

Hingga 2018, pemanfaatan EBT untuk pembangkit listrik baru sebesar 8,8 GW atau 14% dari total kapasitas pembangkit sebesar 64,5 GW. Padahal, pemerintah harus memenuhi target bauran energi nasional sebesar 23% pada 2025. Artinya, tersisa waktu lima tahun untuk mengejar tambahan 9%. Sejumlah upaya perbaikan regulasi dilakukan untuk mempercepat pembangunan pembangkit EBT, namun masih belum cukup.

Karena itu, dukungan politik berbagai pihak perlu dilakukan untuk mendorong pemanfaatan EBT semakin besar dan luas. Pemerintah tengah menyiapkan perbaikan regulasi EBT lainnya. Selain itu, DPR juga mendukung melalui pembentukan Panitia Kerja Kelistrikan untuk memacu percepatan penggunaan EBT menuju target bauran energi nasional. Namun, dukungan publik dan stakeholder terkait juga diperlukan

PROYEKSI PRODUKSI LISTRIK DARI PEMBANGKIT EBT



EBT= Energi Baru Terbarukan

RK: Rendah Karbon

PB: Pembangunan Berkelanjutan,

BaU: Business as Usual

SUMBER: OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2019

PERBAIKAN SKEMA KEPEMILIKAN PEMBANGKIT EBT

**Dari
BOOT**
Build
Own
Operate
Transfer

**menjadi
BOO**
Build
Own
Operate



Perbaikan Regulasi EBT:

- **Peraturan Menteri Keuangan No.03/PMK.011/2012**
tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Fasilitas Dana Geothermal.
- **Peraturan Menteri ESDM No. 49 Tahun 2017**
tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.
- **Peraturan Menteri ESDM No. 49 Tahun 2018**
tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PLN
- **Peraturan Menteri ESDM No. 4 tahun 2020**
tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik
- **Penyusunan Peraturan Presiden**
untuk pembangkit EBT agar harganya tidak jauh dari biaya pokok produksi (BPP) listrik.



Tentang Katadata Insight Center (KIC)

KIC adalah unit dari Katadata Indonesia yang fokus pada riset, analisis data dan insight mendalam terkait dengan isu-isu di bidang ekonomi bisnis. Hasil riset dan analisis KIC berguna bagi pelaku bisnis dan pemerintah untuk mengambil keputusan.



Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI)

APLSI adalah organisasi para produsen listrik swasta untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam mendukung program pemerintah dalam pembangunan sektor kelistrikan. APLSI menjadi wadah para anggota untuk berkomunikasi dengan PLN, pemerintah, industri dan organisasi terkait lainnya.

Kontributor

Head of Katadata Insight Center (KIC)

Stevanny Limuria

Researcher

Jamalianuri, Risanti Delphia S. Simatupang

Tim Data

Puspa Indah, Ibnu Muhammad

Desain

M. Yana, Cicilia Sri Bintang Lestari

Editor

Heri Susanto

Disclaimer: Laporan ini dibuat oleh KIC berdasarkan hasil pengumpulan data dari berbagai referensi dan wawancara stakeholder terkait. Penyusunan laporan mendapatkan masukan dari APLSI. KIC dan APLSI tidak bertanggung jawab atas kerugian dan kerusakan yang dialami dan timbul sebagai akibat oleh pihak ketiga yang menggunakan publikasi ini.